

PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* DENGAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI

B. Anggun Hilendri L, Bambang, Yana Yuliana
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unram

ABSTRACT

The demand for transparency is quite high since Indonesia is mired in the economic crisis. In fact, this situation is very understandable since a very good level of transparency ascertained the parties' concerned regarding accountability of management. Transparency of the company's financial statement is reflected on the audit and the timeliness of financial reporting.

This study aims to examine the influence of good corporate governance on audit report lag with the timeliness of financial statement submission as a moderation variable. Independent variables used in this study are board of commissioners, independent commissioners, audit committees, and public accounting firms, with timeliness of financial statement submission as the moderating variable, and audit report lag as dependent variable. The population in this research is 100 companies listed in Kompas 100 stock index. Pursuant to purposive sampling technique, this study obtained 84 companies for one year observation, which is the year of 2015.

The result of the study indicate that board of commissioner have negative effect to audit report lag, while independent commissioner, audit committee, and the size of public accounting firm has no influence on audit report lag. The results also show that the timeliness of financial statement submission could not be the moderator on the relationship between board of commissioner, independent commissioner, audit committee, and public accountant firms with audit report lag.

Keywords: board of commissioners, independent commissioners, audit committee, public accountant firms, audit report lag, timeliness, financial statement submission.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tuntutan transparansi pada beberapa dekade terakhir cukup tinggi sejak krisis tahun 1990-an. Hal ini dapat dimaklumi karena dengan tingkat

transparansi yang sangat baik maka perusahaan akan memperoleh kepercayaan dari pihak yang berkepentingan seperti pemilik atau *shareholders*, masyarakat umum, regulator atau pemerintah, serta industri lainnya (Sulistyo, 2010). Selain itu reputasi perusahaan juga akan baik dengan adanya kepercayaan dari pihak-pihak tersebut, karena melalui transparansi maka akuntabilitas manajemen dapat dipastikan oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan lain (Kumara, 2015). Transparansi (*transparency*) merupakan bagian dari prinsip-prinsip *good corporate governance* selain akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*) dan keadilan (*fairness*) (Komite nasional kebijakan *governance*, 2006). Sejak Indonesia terperosok dalam krisis ekonomi, maka *corporate governance* menjadi bagian untuk membenahan pengelolaan korporasi (Wardhani, 2013).

Selain itu terdapat pola yang berubah menjadi lebih baik dimana fokus perusahaan tidak hanya terkait dengan laba, tetapi juga dituntut untuk memperhatikan *people* dan *planet* (Elkington, 1997). Grant (2007) mempunyai sudut pandang lain yaitu *equity, ethics and environmental sustainability*. Kaitan hal tersebut dengan *good corporate governance* (GCG) yaitu bahwa aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan sebagaimana prinsip etika bisnis diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat. Dengan menerapkan hal tersebut berarti juga memenuhi prinsip responsibilitas yang diusung GCG. Sehingga diperlukan mekanisme agar tujuan-tujuan tersebut terpenuhi secara baik. Hal ini bertujuan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dan berkepentingan dalam perusahaan.

Bentuk transparansi GCG, dilaporkan dalam laporan tahunan bersama laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan (SAK 2015: 3). Informasi ini berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai salah satu input dalam pengambilan keputusan bisnis (Fujianti, 2016). Laporan keuangan harus bersifat transparansi dan relevan sehingga harus disajikan tepat waktu agar informasi laporan keuangan dapat lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan (Wijaya, 2012). Pengauditan atas laporan keuangan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan tersebut. Hasil audit diharapkan berkualitas melalui proses yang cukup dan mendalam baik dalam hal biaya maupun waktu. Banyaknya prosedur audit yang harus dilakukan seorang auditor dalam mengaudit kliennya membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya sehingga hal ini berpengaruh pada lamanya ARL. ARL adalah lamanya hari yang

dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit (Lawrence dan Briyan, 1998). Lamanya waktu pekerjaan audit mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan. Audit yang lambat tidak baik untuk perusahaan begitu juga dengan audit yang terlalu cepat karena mempengaruhi kualitas informasi didalamnya. Sehingga ada batas waktu ideal dalam penyelesaian audit tergantung besar kecilnya perusahaan dan pemahaman auditor terhadap jenis usaha perusahaan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Fujianti (2016) yang menguji pengaruh GCG terhadap ARL dengan ketaatan hukum sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi yang digunakan yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan menghitung jumlah dewan komisaris dalam perusahaan saja. Variabel komite audit diukur dengan menghitung jumlah komite audit dalam perusahaan karena semua anggota komite audit sifatnya independen tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan yang bersangkutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap ARL?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap ARL?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap ARL?
4. Apakah KAP berpengaruh terhadap ARL?
5. Apakah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memoderasi hubungan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan KAP dengan ARL?

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh dewan komisaris terhadap ARL.
2. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komisaris independen terhadap ARL.
3. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh komite audit terhadap ARL
4. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh KAP terhadap ARL.

5. Untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh moderasi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dalam hubungan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit, dan KAP dengan ARL.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis pengaruh GCG terhadap ARL dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebagai variabel moderasi dan bagi investor diharapkan pula dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan tersendiri dalam berinvestasi, sedangkan bagi Profesi Akuntan Publik dan KAP dapat menjadi bahan referensi yang dapat digunakan dan menjalankan praktik jasa audit khususnya dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan audit melalui pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit report lag* sehingga penyelesaian audit dapat dipercepat sehingga mempercepat publikasi laporan keuangan juga.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi (*agency theory*) merupakan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana ada satu atau lebih orang (yaitu *principal* atau pemegang saham atau pemilik) melibatkan atau menunjuk orang lain (yaitu agen atau manajemen) untuk bertindak atas nama pemilik. Antara pemilik dan pengelola terdapat perbedaan kepentingan. Ada beberapa pengelola yang menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh pemilik. Namun tidak semua pengelola atau manajemen berbuat negatif. Beberapa pengelola atau manajemen yang menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan oleh pemilik inilah yang akan memicu timbulnya masalah keagenan. Masalah keagenan potensial terjadi apabila bagian kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari seratus persen. Proporsi kepemilikan tersebut membuat agen cenderung bertindak untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Inilah yang nantinya akan menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*).

Bahasan *audit report lag* berkaitan erat dengan *agency theory* dimana perusahaan dapat meminta auditor untuk memeriksa lebih lanjut mengenai hutang jangka panjang dan laba rugi perusahaan yang berperan penting dalam laporan keuangan (Wijaya, 2012). Selain itu *agency theory* merupakan

teori yang relevan dalam penelitian ini karena menjelaskan fungsi dewan komisaris dan komite audit dalam struktur GCG sebagai pemonitor dari mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan (Fujianti, 2016). Fungsi monitoring ini berkaitan dengan praktek GCG dan pelaporan keuangan sebagai proses pertanggungjawaban kinerja agen (Shukeri dan Nelson 2011).

Landasan Konsep

Good Corporate Governanace

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*, 2004) dan FCGI (2001) mendefinikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan *intern* dan *ekstern* lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan KNKG (2006) dalam rangka penerapan GCG, masing-masing perusahaan harus menyusun pedoman GCG perusahaan dengan mengacu pada pedoman GCG yang mencakup sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan;
2. Kedudukan dan fungsi RUPS, dewan komisaris, direksi, komite penunjang dewan komisaris, dan pengawasan internal;
3. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya fungsi setiap organ perusahaan secara efektif;
4. Kebijakan untuk memastikan terlaksananya akuntabilitas, pengendalian internal yang efektif dan pelaporan keuangan yang benar;
5. Pedoman perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis;
6. Sarana pengungkapan informasi untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya;
7. Kebijakan penyempurnaan berbagai peraturan perusahaan dalam rangka memenuhi prinsip GCG.

Pelaksanaan GCG harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar sebagai berikut:

- 1) transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan;
- 2) akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif;

- 3) pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan perusahaan;
- 4) independensi (*independency*) yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun; dan
- 5) kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG sebagaimana dimaksud diatas, perusahaan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

- 1) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris;
- 2) pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi;
- 3) kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
- 4) penanganan benturan kepentingan;
- 5) penerapan fungsi kepatuhan;
- 6) penerapan fungsi audit intern;
- 7) penerapan fungsi audit ekstern;
- 8) penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
- 9) penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposures*);
- 10) transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal; dan
- 11) rencana strategis perusahaan.

Penilaian terhadap pelaksanaan GCG yang berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar tersebut dikelompokkan dalam suatu *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome*.

Audit Report Lag

Menurut Sukrisno Agoes (2012:4) *auditing* adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Sedangkan *auditing* menurut Mulyadi (2002:9) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-

pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa audit dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang ada serta mengevaluasi bahan bukti tersebut, yang bertujuan agar dapat memberikan suatu pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan.

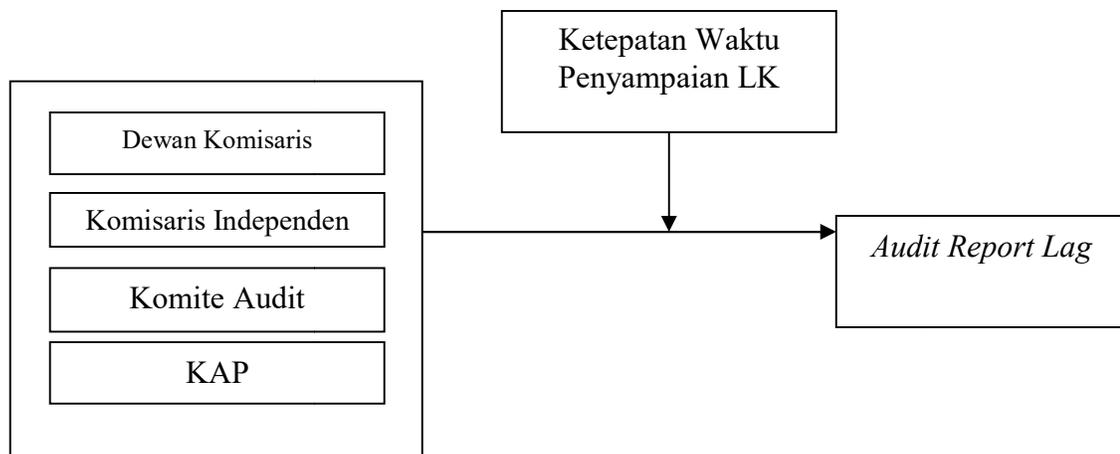
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan

Salah satu faktor penting untuk menyajikan informasi pada laporan keuangan yang relevan adalah ketepatwaktuan. Laporan keuangan sebagai sebuah informasi yang disediakan tepat waktu bagi pembuat keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuannya dalam mempengaruhi pengambilan keputusan, terutama investor dan kreditor. Jika terdapat keterlambatan dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan kemampuan pengaruh terhadap keputusan. Ketepatwaktuan dapat diukur sebagai rentang waktu antara tanggal laporan keuangan perusahaan dan tanggal ketika informasi keuangan disampaikan kepada Bapepam LK dan Bursa Efek dan diumumkan ke publik. Selain itu, pengukuran ketepatwaktuan juga dapat mengacu pada ketentuan yang berlaku.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka rerangka konseptual yang menghubungkan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Audit Report Lag*

Teori dari hipotesis ini bertumpu pada teori agensi, dimana pihak pemilik (*principal*) termotivasi terhadap transparansi, tidak adanya kelalaian, dan ketepatan waktu yang dilakukan oleh manajer (*agent*). Pengaturan jumlah dewan komisaris diharapkan dalam pelaksanaan pengawasan dan penasihatannya bisa berjalan lebih baik dan efisien. Namun menyangkut koordinasi dan komunikasi, terdapat kelemahan yang terkait dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang banyak. Kurangnya koordinasi dan komunikasi membuat kurang efisien serta sulit dalam memonitor, dibandingkan dengan ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota lebih sedikit. Wardhani, (2013) berpendapat bahwa ukuran dewan yang memiliki anggota besar menyebabkan kurang terciptanya partisipasi, kurang terorganisir serta sulit dalam mencapai suatu kesepakatan. Ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih sedikit atau kecil, dianggap akan lebih mudah dalam birokrasi, lebih fungsional sehingga lebih mampu dalam memberikan pengawasan saat proses pelaporan keuangan (Fujianti, 2016). Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H1: Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *audit report lag*

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag*

Komisaris independen terbukti penting dan telah diakui bahkan diatur dalam peraturan pasar modal mengenai keharusan perusahaan memiliki komisaris independen (Fujianti, 2016). Komisaris independen merupakan salah satu unsur penting dalam mekanisme GCG serta kehadirannya dalam dewan komisaris merupakan rekomendasi dari praktisi GCG (Zattoni & Cuomo, 2010). Regulasi dari berbagai negara mengharuskan komisaris independen mengemban tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan yang efektif atas perilaku direksi (Naimi et al, 2010). Dengan demikian, proporsi komisaris independen yang cukup akan mengurangi jumlah orang yang tidak memiliki kepentingan apapun didalam perusahaan dan mengurangi adanya intervensi terhadap pengerjaan laporan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H2: komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Dalam agensi teori dijelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen dan Meckling, 1976). Pendelegasian *principal* kepada *agent* membuat *principal* tidak dapat

mengawasi kinerja manajer, sehingga tindakan manajer terkadang tidak sesuai dengan keinginan pemilik. Perbedaan kepentingan tersebut dapat mengarah pada tindakan kecurangan dan penipuan yang dilakukan oleh *agent* atau manajer dengan *principal* atau pihak pemilik (Widya, 2013). Oleh karena itu diperlukan anggota komite audit yang independen sebagai pihak yang membantu *principal* atau pihak pemilik dalam mengawasi aktivitas *agent* dan mengurangi manfaat dari pemotongan informasi yang dilakukan oleh *agent* (Hashim dan Rahman, 2011).

Untuk menjaga independensi komite audit maka anggota komite audit tidak boleh memiliki hubungan istimewa terhadap pihak manajemen perusahaan, seperti misalnya hubungan keluarga. Independensi komite audit dapat berkontribusi terhadap kualitas pelaporan keuangan sehingga menurunkan *audit report lag* dalam perusahaan (Wijaya, 2012). Hal ini didukung oleh penelitian Kumara (2015), Wardhani (2013), dan Fujianti (2016) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Namun berbeda dengan penelitian Widya (2013) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap ARL. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis berikut:

H3: Komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Pengaruh KAP Terhadap *Audit Report Lag*

Laporan keuangan yang disajikan ke publik harus melalui proses audit oleh auditor eksternal (akuntan publik) untuk memperoleh integritas dan legitimasi atas akurasi laporan keuangan tersebut. Proses audit memerlukan waktu sehingga dapat berpengaruh terhadap *audit report lag*. Afify (2009) menyatakan bahwa perusahaan audit yang besar memiliki motivasi yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan audit dengan tepat waktu, guna menjaga reputasi dan nama mereka. Reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) ini merupakan sinyal bahwa KAP tersebut melakukan proses audit dengan baik sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat. KAP besar diprediksi dapat menyelesaikan proses audit lebih cepat dibandingkan KAP kecil, karena mereka memiliki lebih banyak staf audit yang lebih berkualitas. Keahlian auditor berdampak pada efisiensi dan efektivitas proses audit (Wardhani, 2013). Hal ini didukung oleh penelitian Didipu (2016) yang menyatakan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap ARL. Namun berbeda dengan penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) yang mengatakan bahwa KAP tidak berpengaruh terhadap ARL. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis (H4) adalah sebagai berikut :

H4 : KAP berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*.

Pengaruh Moderasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dalam Hubungan Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik Dengan *Audit Report Lag*

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan mendapat perhatian dari regulator. Perhatian ini terutama ditujukan pada batas waktu penyampaian laporan keuangan. Batas waktu penyampaian laporan keuangan ini menjadi tekanan bagi perusahaan untuk mengurangi *audit report lag*, karena perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut akan dikenakan sanksi.

Dengan adanya tuntutan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan maka diharapkan dapat memperpendek ARL. Karena dengan adanya batas waktu, auditor tertuntut untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Selain itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan juga diharapkan memperkuat hubungan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan KAP dengan ARL. Berdasarkan penelitian terdahulu keberadaan pihak-pihak tersebut dalam perusahaan mempengaruhi ARL. Pengaruh tersebut diharapkan semakin kuat dengan adanya tuntutan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Hal tersebut didukung oleh penelitian Fujianti (2016). agar mentaati peraturan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis (H5) adalah sebagai berikut :

H5: Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memoderasi hubungan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan KAP terhadap *audit report lag*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Lokasi penelitian ini adalah di Bursa Efek Indonesia yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam indeks saham Kompas 100 periode tahun 2015. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan termasuk dalam indeks saham Kompas 100 periode tahun 2015.
- b. Perusahaan yang menyajikan semua data yang diperlukan terkait variabel-variabel dalam penelitian ini.

Table 3.1
Sampel Perusahaan

Keterangan	Jumlah perusahaan
Perusahaan publik yang terdaftar dalam indeks saham Kompas 100 tahun 2015	100
Perusahaan yang keluar dari daftar saham Kompas 100 tahun 2015	(9)
Perusahaan yang tidak menyajikan semua data yang diperlukan untuk variabel-variabel penelitian	(7)
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel	84

Sumber: www.idx.com (data sekunder diolah), 2017

Variabel-variabel yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. *Audit report lag* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku atau akhir tahun fiskal hingga tanggal laporan keuangan auditan (Lawrence dan Briyan, 1998). Variabel ini diukur berdasarkan jumlah hari antara akhir tahun fiskal dan tanggal laporan audit perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan/laporan keuangan auditan. Variabel ini dilambangkan dengan ARL.
- b. Dewan komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (POJK Nomor 33/POJK.04/2014). Variabel ini diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan yang ada dalam suatu perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan DK.
- c. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen (POJK Nomor 33/POJK.04/2014). Variabel ini diukur dengan melihat proporsi jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan jumlah anggota dewan komisaris dalam perusahaan. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan variabel KI.
- d. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris (POJK Nomor 55 /Pojk.04/2015). Variabel

- ini diukur dengan menghitung jumlah komite audit yang ada dalam suatu perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan variabel KA.
- e. KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang ini (UU No. 5 Tahun 2011). Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu: *Score* 0 apabila KAP kecil dan *Score* 1 apabila KAP besar. Kriteria besar kecilnya KAP berdasarkan reputasi perusahaan audit. Berdasarkan kajian teori dan beberapa penelitian terdahulu maka KAP termasuk dalam kriteria besar apabila termasuk dalam KAP *big four* dan termasuk dalam kriteria kecil apabila termasuk dalam KAP *big non four*. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan variabel KAP.
- f. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan bagi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) Nomor : Kep-346/BL/2011, Tanggal : 5 Juli 2011 adalah tiga bulan setelah tanggal laporan keuangan. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu: *Score* 0 apabila tidak tepat waktu dan *Score* 1 apabila tepat waktu. Perusahaan dikatakan tepat waktu apabila menyampaikan laporan keuangannya sebelum tanggal 31 Maret setelah tahun buku. Apabila melewati tanggal tersebut perusahaan dikatakan tidak tepat waktu. Data untuk variabel ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan. Variabel ini dilambangkan dengan variabel KW.

Model regresi berganda dirumuskan dengan persamaan berikut:

$$ARL = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 KI + \beta_3 KA + \beta_4 KAP + \beta_5 KW + e$$

Regresi moderat uji interaksi:

$$ARL = \alpha + \beta_1 DK + \beta_2 KI + \beta_3 KA + \beta_4 KAP + \beta_5 KW + \beta_6 KW * DK + \beta_7 KW * KI + \beta_8 KW * KAI + \beta_9 KW * KAP + e$$

Dimana:

- α = konstanta
 β = koefisien regresi
DK = jumlah dewan komisaris
KI = rasio komisari independen
KA = jumlah komite audit
KAP = kriteria kantor akuntan publik
KW = kriteria ketepatan waktu penyajian laporan keuangan
e = *error*

PEMBAHASAN

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap *Audit Report Lag*

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* atau hipotesis H1 ditolak yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar -2,670 dan nilai signifikan sebesar $0,009 < 0,05$. Artinya semakin banyak anggota dewan komisaris akan mengurangi jangka waktu *audit report lag*. Jumlah rata-rata dewan komisaris dalam sampel adalah 6 orang. Menurut Kumara (2015) ukuran dewan yang memiliki jumlah anggota yang lebih banyak dinilai akan lebih fokus pada masing-masing departemen sehingga penyelesaian aktivitas masing-masing departemen dapat diselesaikan dengan lebih cepat. Dengan adanya pembagian kerja yang baik maka tugas dewan komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasehat kepada direksi atau manajemen perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Pengawasan dan nasihat dari dewan komisaris mempengaruhi manajemen dalam menyusun laporan keuangan perusahaan, karena merasa diawasi maka manajemen tertuntut untuk taat terhadap aturan. Ini berarti keberadaan dewan komisaris dalam mekanisme GCG mampu memotivasi dewan komisaris untuk melakukan tekanan kepada manajemen agar menyajikan laporan keuangan tepat waktu atau mengurangi *audit report lag*.

Selain itu keberadaan dewan komisaris mampu mengurangi asimetri informasi akibat adanya perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kumara (2015) yang mengatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Hal ini berbeda dengan penelitian Fujianti (2016) dan Wardhani (2013) yang mengatakan semakin banyak anggota dewan komisaris akan memperpanjang jangka waktu *audit report lag* dikarenakan masalah koordinasi dan komunikasi yang ada dalam ukuran dewan yang memiliki anggota lebih banyak akan memperlambat pengambilan keputusan termasuk dalam kaitannya dengan penyajian laporan keuangan, sehingga ukuran dewan komisaris meningkatkan *audit report lag*.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Audit Report Lag*

Berdasarkan hasil uji regresi nilai probabilitas signifikansi komisaris independen sebesar 0,140 lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* atau hipotesis H2 ditolak. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah rata-rata komisaris independen dalam sampel adalah 43,15% jumlah ini belum ideal sebagaimana di industri lain yaitu perbankan dimana jumlah komisaris

independen adalah 50%. Dari 84 sampel perusahaan yang diteliti terdapat 51,2% perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu artinya kontribusi komisaris independen dalam melaksanakan tugasnya telah cukup baik. Namun demikian 48,8% perusahaan masih mengalami keterlambatan dalam pelaporan. Sebagaimana yang disampaikan pada landasan teori bahwa tugas utama komisaris independen adalah mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan taat terhadap aturan. Selain itu komisaris independen tidak hanya melakukan pengawasan melainkan juga memberikan nasihat kepada direksi. Namun tidak ada regulasi yang mengharuskan direksi untuk mendengar saran atau nasihat komisaris independen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Moghaddam (2014) dan Raharja (2013) yang mengatakan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun berbeda dengan penelitian Wardhani (2013), Kumara (2015) dan Fujianti (2016) yang mengatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* yang artinya semakin banyak anggota komisaris independen akan mengurangi jangka waktu *audit report lag*. Hal tersebut diperkuat oleh Fama dan Jensen (1983) yang menyatakan bahwa komisaris dapat memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah keagenan dan kehadiran komisaris independen dalam struktur GCG dapat menyebabkan lebih banyak pengambilan keputusan yang efektif termasuk dalam kaitannya dengan *audit report lag*.

Pengaruh Komite Audit Terhadap *Audit Report Lag*

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* atau hipotesis H3 ditolak yang dibuktikan dengan nilai probabilitas signifikansi sebesar $0,281 > 0,05$. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah rata-rata komite audit dalam sampel adalah 3 orang dan diantaranya terdapat komisaris independen sebagai ketua komite audit. Dalam penelitian ini komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, hal ini konsisten dengan komisaris independen yang tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, karena komite audit dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Adapun tugas komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan.

Dalam hal untuk mempercepat pelaporan bukan merupakan tugas utama komite audit karena terdapat risiko terhadap kualitas laporan keuangan. Bila dipaksakan untuk mempercepat pelaporan kemungkinan

laporan keuangan yang disusun tidak informatif dan berdampak buruk bagi perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Fujianti (2016) dan Widya (2013) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Namun hal ini berbeda dengan penelitian Wardhani (2013) dan Wijaya (2012) yang mengatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Pengaruh Kantor Akuntan Publik Terhadap *Audit Report Lag*

Berdasarkan hasil uji regresi nilai probabilitas signifikansi kantor akuntan publik sebesar 0,742 jauh diatas 0,05 yang berarti bahwa kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* atau hipotesis H4 ditolak. Ini berarti besar kecilnya KAP (*big four* atau *non big four*) tidak mempengaruhi *audit report lag*. KAP *big four* di Indonesia belum menunjukkan periode waktu audit yang pendek dibandingkan yang *non big four*, ini berarti regulasi mengenai akuntan publik di Indonesia sudah baik, yang terlihat dari dikeluarkannya peraturan undang-undang nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik serta adanya *quality assurance*.

Berdasarkan sampel penelitian terdapat banyak terdapat perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* namun mengalami keterlambatan dalam pelaporan, sebaliknya banyak terdapat perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* namun justru tepat waktu dalam pelaporan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sumartini dan Widhiyani (2014) dan Fujianti (2016) yang mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Didipu (2016) yang mengatakan bahwa ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *audit report lag* yang berarti bahwa KAP *big four* mampu menyelesaikan pekerjaan auditnya tepat waktu dibandingkan dengan yang *non big four*.

Pengaruh Moderasi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Dalam Hubungan Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik Dengan *Audit Report Lag*

Hasil uji interaksi moderasi menunjukkan bahwa interaksi dari variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* atau hipotesis H5 ditolak. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas signifikansi interaksi antara ketepatan waktu penyajian laporan keuangan dengan dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kantor akuntan publik secara berturut-turut adalah 0.666,

0.638, 0.258 dan 0.941 semuanya jauh diatas 0.05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ketepatan waktu penyajian laporan keuangan tidak bisa menjadi moderator antara variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kantor akuntan publik dengan *audit report lag*. sebelumnya telah dibahas bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, hal ini terkait dengan tugas utama pihak tersebut. Dimana komisaris independen bertugas mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan yang buat oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan taat terhadap aturan, sedangkan komite audit bertugas dan bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.

Dalam hal untuk mempercepat pelaporan bukan merupakan tugas utamanya karena terdapat risiko terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan sehingga tuntutan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak mampu memoderator hubungan komisaris independen dan komite audit dengan *audit report lag*. ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*, jangka waktu *report lag* perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* tidak jauh berbeda dengan KAP *non big four*. Dari sampel penelitian banyak terdapat perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* namun mengalami keterlambatan dalam pelaporan, sebaliknya banyak terdapat perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* namun justru tepat waktu dalam pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak mampu memoderator KAP dengan *audit report lag*. Namun demikian meskipun tidak terdapat pengaruh yang signifikan, kontribusi pihak-pihak tersebut telah cukup baik dalam mendorong proses pelaporan tepat waktu yang didukung oleh hasil statistik deskriptif yang mencapai 51,2% perusahaan tepat waktu dalam pelaporan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Fujianti (2016) yang mengatakan bahwa ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan memoderasi dewan komisaris dan komite audit dengan *audit report lag*.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh GCG yang diukur dengan keberadaan struktur GCG yaitu dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kantor akuntan publik terhadap *audit report lag*. Berdasarkan hasil penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. Semakin banyak anggota dewan komisaris akan mengurangi jangka waktu *audit report lag*. Jumlah rata-rata dewan komisaris dalam sampel adalah 6 orang.

- b. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *audit report lag* karena tugas utama komisaris independen adalah mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan taat terhadap aturan. Dari 84 sampel perusahaan yang diteliti terdapat 43 perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya tepat waktu, artinya kontribusi komisaris independen dalam melakukan tugasnya telah cukup baik.
- c. Komite audit tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah rata-rata komite audit dalam sampel adalah 3 orang dan diantaranya terdapat komisaris independen sebagai ketua komite audit. Adapun tugas komite audit adalah melakukan penelaahan atas informasi keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Dalam hal untuk mempercepat pelaporan bukan merupakan tugas utama komite audit karena terdapat risiko terhadap kualitas laporan keuangan.
- d. Kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa KAP *big four* di Indonesia belum menunjukkan periode waktu audit yang pendek dibandingkan yang *non big four*, ini berarti regulasi mengenai akuntan publik di Indonesia sudah baik
- e. Interaksi dari variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kantor akuntan publik tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan tidak bisa menjadi moderator antara variabel dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kantor akuntan publik dengan *audit report lag*.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel lain yang diprediksi mempengaruhi *audit report lag* serta menggunakan variabel moderasi lain yang lebih mampu memoderator serta bagi penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama agar hasil pengujian lebih akurat karena dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap *audit report lag*

DAFTAR PUSTAKA

- Afify, H.A.E. 2009. Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. *Journal of Applied Accounting Research*. Vol. 10. No. 1, pp:56 – 86
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Didipu, Fajrin Abd. Rahman. 2016. *Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan, Dan Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Di Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015)*. Skripsi Universitas Hasanuddin.
- Elkington, John. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Capstone.
- Fujianti, Lailah. 2016. Ketaatan Hukum Mampukah Memoderasi Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Audit Report Lag. *Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung*.
- Grant, Robert M. 2007. *Contemporary Strategy Analysis*. Washington D.C. Blackwell Publishers.
- Hashim, U.J.B., Rahman, R.B.A. 2011. Audit Report Lag and the Effectiveness of Audit Committee Among Malaysian Listed Companies. *International Bulletin of Business Administration*. No. 10, pp. 50-61
- Jensen, M.C., Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta Nomor 307/BEJ/07-2004
- Kumara, Raditya Andika. 2015. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Audit Report Lag (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013)*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Lawrence, Janice and Barry Bryan. 1998. Characteristics Associated With Audit Delay In The Monitoring Of Low Income Housing Projects. *Journal Of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*, V. 10, No. 2, pp. 173-191.
- Mulyadi. 2002. *Auditing* (edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Naimi, Mohamad. Mohamad-Nor, Rohami Shafie and Wan Nordin Wan-Hussin, 2010. Corporate Governance And Audit Report Lag In Malaysia. Malaysia: *Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance*. Vol. 6, No. 2, 57–84
- Organisation for Economic Co-operation and Development, 2004. *OECD Principles of Corporate Governance*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Otoritas Jasa Keuangan. Roadmap Tata Kelola Perusahaan Indonesia Menuju Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Lebih Baik, Jakarta : OJK, 2014.
- Shukeri, S.W., Nelson, S.P. 2011. Corporate Governance and Audit Report Timeliness: Evidence from Malaysia, *Research in Accounting in Emerging Economies*, No. 11: 109 – 127.
- Standar Akuntansi Keuangan : Per Efektif 1 Januari 2015, 2015. Ikatan Akuntan Indonesia, Salemba empat
- Sulistyo, Wahyu Adhy N. 2010. *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2006-2008*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Sumartini dan Widhiyani. 2014. Pengaruh Opini Audit, Solvabilitas, Ukuran KAP dan Laba Rugi Pada Audit Report Lag. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 9 No. 1.
- Bank Indonesia. 2013. Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Prihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
- Wardhani, Armania Putri. 2013. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Audit Report Lag*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Widya, Maria Graffeliesta. 2013. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Non-Financial Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Wijaya, Aditya Taruna. 2012. *Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Report Lag (Kajian Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010)*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Wikipedia. 2014. Indeks Kompas 100. https://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Kompas100, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.
- www.idx.co.id. Diakses pada tanggal 15 Januari 2017.
- Zattoni, A. and Cuomo, F. 2010. How independent, competent and incentivized should non-executive directors be? An empirical examination of good corporate codes. *British Journal of Management*, 21 (1): 63-79.

Lampiran 1 Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perusahaan
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk
3	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk
4	ADRO	Adaro Energy Tbk
5	AISA	Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
6	AKRA	AKR Corporindo Tbk
7	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
8	APLN	Agung Podomoro Land Tbk
9	ASII	Astra International Tbk
10	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
11	BBCA	Bank Central Asia Tbk
12	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
13	BBRI	Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
14	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
16	BDMN	Bank Danamon Tbk
17	BEST	Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk
18	BHIT	MNC Investama Tbk
19	BJBR	BPD Jawa Barat & Banten
20	BJTM	BPD Jawa Timur Tbk
21	BMRI	Bank Mandiri (Persero) Tbk
22	BMTR	Global Mediacom Tbk
23	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk
24	BWPT	BW Plantation Tbk
25	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
26	CTRA	Ciputra Development Tbk
27	CTRP	Ciputra Property Tbk
28	DILD	Intiland Development Tbk
29	DOID	Delta Dunia Makmur Tbk
30	ELSA	Elnusa Tbk
31	EXCL	XL Axiata Tbk
32	GGRM	Gudang Garam Tbk
33	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
34	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
35	INCO	Vale Indonesia Tbk
36	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
37	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
38	ISAT	Indosat Tbk

No	Kode	Nama Perusahaan
39	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
40	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk
41	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk
42	KIJA	Kawasan Industri Jababeka Tbk
43	KLBF	Kalbe Farma Tbk
44	LPCK	Lippo Cikarang Tbk
45	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
46	LPPF	Matahari Department Store Tbk
47	LSIP	PP London Sumatera Indonesia Tbk
48	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk
49	MDLN	Modernland Realty Ltd Tbk
50	MEDC	Medco Energi Internasional Tbk
51	META	Nusantara Infrastructure Tbk
52	MLPL	Multipolar Tbk
53	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk
54	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk
55	NIRO	Nirvana Development Tbk
56	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
57	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk
58	PNLF	Panin Financial Tbk
59	PTBA	Bukit Asam (Persero) Tbk
60	PTPP	Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
61	PWON	Pakuwon Jati Tbk
62	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk
63	SAME	Sarana Meditama Metropolitan Tbk
64	SCMA	Surya Citra Media Tbk
65	SIDO	Industri Farmasi dan Jamu Sido Muncul Tbk
66	SILO	Siloam International Hospitals Tbk
67	SIMP	Salim Ivomas Tbk
68	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk
69	SMCB	Holcim Indonesia Tbk
70	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
71	SMRA	Summarecon Agung Tbk
72	SRIL	Sri Rejeki Isman Tbk
73	SSIA	Surya Semesta Internusa Tbk
74	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
75	TAXI	Express Transindo Utama Tbk
76	TBIG	Tower Bersama Infrastructure Tbk

No	Kode	Nama Perusahaan
77	TINS	Timah (Persero) Tbk
78	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
79	TMPI	PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk
80	TOTL	Total Bangun Persada Tbk
81	UNTR	United Tractors Tbk
82	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
83	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk
84	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk

Lampiran 2 Hasil Penelitian

Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Berganda

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.461 ^a	.212	.162	18.640	1.841

a. Predictors: (Constant), KW, KI, KAP, DK, KA

a. Dependent Variable: ARL

Sumber: *SPSS 16* (data sekunder diolah), 2017

Hasil Uji F Regresi Berganda

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7294.432	5	1458.886	4.199	.002 ^a
	Residual	27099.806	78	347.433		
	Total	34394.238	83			

a. Predictors: (Constant), KW, KI, KAP, DK, KA

b. Dependent Variable: ARL

Hasil Uji t Regresi Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	110.772	12.836		8.630	.000
	DK	-3.327	1.246	-.288	-2.670	.009
	KI	-.261	.175	-.153	-1.490	.140
	KA	-3.511	3.234	-.118	-1.086	.281
	KAP	1.435	4.345	.034	.330	.742
	KW	-9.231	4.171	-.228	-2.213	.030

a. Dependent Variable: ARL

Sumber: *SPSS 16* (data sekunder diolah), 2017

Hasil Uji Koefisien Determinasi Regresi Moderat

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.488 ^a	.238	.146	18.814	1.936

a. Predictors: (Constant), KWKAP, DK, KI, KWDK, KAP, KWKI, KA, KWKA, KW

a. Dependent Variable: ARL

Sumber: *SPSS 16* (data sekunder diolah), 2017

Hasil Uji F Regresi Moderat

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8200.186	9	911.132	2.574	.012 ^a
	Residual	26194.052	74	353.974		
	Total	34394.238	83			

a. Predictors: (Constant), KWKAP, DK, KI, KWDK, KAP, KWKI, KA, KWKA, KW

b. Dependent Variable: ARL

Sumber: *SPSS 16* (data sekunder diolah), 2017

Hasil Uji t Regresi Moderat

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	182.273	102.376		1.780	.079
DK	-3.370	1.269	-.292	-2.655	.010
KI	-.235	.190	-.138	-1.239	.219
KA	-4.230	3.454	-.142	-1.224	.225
KAP	1.657	4.437	.040	.373	.710
KW	-12.333	6.433	-.305	-1.917	.059
KWDK	-12.441	28.720	-.048	-.433	.666
KWKI	-93.466	197.823	-.076	-.472	.638
KWKA	-29.775	26.128	-.131	-1.140	.258
KWKAP	-2.746	36.912	-.008	-.074	.941

a. Dependent Variable: ARL

Sumber: *SPSS 16* (data sekunder diolah), 2017